



RENCANA KERJA (RENJA) 2023




DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Alamat : Kompleks Perkantoran Bupati No 6 Kdi Lameroro
Telp / Fax :Rumbia-Kodepos 93771
e-mail : dpkpp.bombana@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karean berkat Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2022 ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2023 ini dimaksudkan agar terjadinya efektifitas pelaksanaan kegiatan, tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk Tahun 2023 yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan : (a) arah kebijakan keuangan daaerah, (b) strategi pembangunan daerah, (c) kebijakan umum, (d) program Perangkat Daerah (PD) dan lintas Perangkat Daerah, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini masih jauh dari kesempurnaan, dan oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun akan dijadikan sebagai masukan untuk kepentingan penyempurnaan dimasa mendatang. Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana ini.

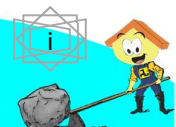
Rumbia, JUNI 2022

Kepala Dinas



I. RUSDIAMIN

NIP. 19651231 200502 1 026





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematikan Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	28
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bombana	31
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023	43
3.1 Telaahan teradap Kebijakan Nasional	43
3.2 Tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	50
3.3 Program dan Kegiatan	50
BAB IV PENUTUP	66





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja perangkat daerah dan pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	15
Tabel 2.2	Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	26
Tabel 2.3	Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2023	32
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat dan pemangku kepentingan tahun 2023	42
Tabel 3.1	Rumusan rencana program kegiatan tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	54





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah rencana yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (Satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta peraturan perundangan, maka diperlukan Rencana Kerja (Renja). Pedoman penyusunan Renja dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang penyusunannya mengacu pada :

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana 2023-2026,dalam rangka perwujudan keberhasilan visi dan misi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bombana terpilih .
2. Rencana kerja dan evaluasi atas tingkat capaian indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026;
3. Rencana Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2023 - 2026
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023;
5. Usulan kegiatan pembangunan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten.





Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun ke depan, RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPD dan Renstra) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD dan Renstra dapat disimpulkan bahwa RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah.

Tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPBD) dapat diuraikan sebagai berikut : Rencana pembangunan 5 (lima) tahunan (Renstra) yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA PD.

RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA Perangkat Daerah ini akan menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DPA. DPA merupakan dasar dari penentuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

1.2 Landasan Hukum

- ✚ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- ✚ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- ✚ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- ✚ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- ✚ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- ✚ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
- ✚ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang





- Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- ✚ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - ✚ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - ✚ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - ✚ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - ✚ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - ✚ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - ✚ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - ✚ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - ✚ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - ✚ Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022
 - ✚ Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
 - ✚ Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - ✚ Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026;





- Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2023 - 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022 adalah menjabarkan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023-2026 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023 yang meliputi rencana kerja, program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 adalah :

- Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana;
- Mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- Penyusunan rancangan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, Renstra, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.





1.4 Sistematika Penyusunan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup



**BAB II****EVALUASI RENJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2022****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2022 dan Capaian Renstra**

Evaluasi terhadap Pencapaian target Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022 dapat kami jabarkan sebagai berikut :

1. Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yakni :

Program :

- Program Penatagunaan Tanah. Indikator program ini adalah Persentase luas lahan bersertifikat dengan target 20,14624% terealisasi 20,14544%. Hal ini diakibatkan regulasi pemberian sertifikasi kepada kk miskin tidak terselesaikan, dan disebabkan juga kurangnya SDM di bidang Perumahan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana mengambil langkah-langkah mengajukan permohonan penambahan personil yang mumpuni dibidang pertanahan.
- Program pengembangan perumahan. Indikator persentase penurunan backlog dengan target 0,00% dan terealisasi 49,89%. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan pembangunan baru rumah yang ada dikecamatan menjadi peningkatan kualitas. Jadi kegiatan pembangunan baru rumah hanya diampu oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana.

Kegiatan :

- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi tanah kabupaten/kota. Indikator kegiatan ini yaitu jumlah bidang tanah kk miskin yang terfasilitasi dengan target 100 Bidang tanah terelasisasi 100 bidang tanah dan persentase capaiannya 100%.





Hal ini diakibatkan regulasi pemberian sertifikasi kepada kk miskin tidak terselesaikan, dan disebabkan juga kurangnya SDM di bidang Perumahan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana mengambil langkah-langkah mengajukan permohonan penambahan personil yang mumpuni dibidang pertanahan.

2. Program / kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil dan keluaran yang direncanakan, yakni :

Program :

- Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh. Indikator program ini adalah Persentase rumah layak huni dengan target peningkatan sebesar 90,73% terealisasi 92,18% sehingga persentase capaiannya 101,60%.

Penyebab capaian target melebihi target yang telah ditetapkan karena Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mendapatkan bantuan penyediaan rumah layak huni dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya sebanyak 789 Unit, Bantuan Rumah Khusus Nelayan sebanyak 50 Unit, dan Penyediaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) sebanyak 46 unit . Selain dari dana APBN, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga mendapatkan bantuan penyediaan rumah layak huni dari dana APBD Provinsi melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara berupa bantuan bedah rumah sebanyak 50 unit.

Indikator Program ini berimplikasi langsung terhadap capaian Indikator Sasaran OPD yaitu Persentase KK Miskin Persentase KK miskin yang memiliki rumah layak huni. Hal ini juga berimplikasi terhadap peningkatan jumlah rumah layak huni di Kabupaten Bombana.

Sedangkan kebijakan yang dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana untuk meningkatkan rumah layak huni adalah dengan menyiapkan lebih lengkap lagi dokumen pendukung proposal yang akan diajukan ke Kementerian.





- Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum. Indikator kinerja program ini adalah Persentase Rumah tangga pengguna listrik dengan target 57,12% terealisasi sebesar 58,41% sehingga persentase capaiannya sebesar 102,26%.

Hal ini disebabkan adanya perubahan Rencana Anggaran Biaya untuk Bantuan Sambungan Listrik bagi KK Miskin, yang awalnya hanya untuk 650 SR menjadi 674 SR. RAB bantuan sambungan listrik berubah adanya penerima yang mendapatkan diskon karena berada didaerah terpencil, terluar, dan tertinggal.

Indikator program ini berkontribusi terhadap indicator sasaran OPD Persentase KK miskin yang memiliki akses terhadap energi listrik dan juga berimplikasi terhadap penurunan jumlah masyarakat miskin yang tidak mempunyai listrik

Kegiatan :

- Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota dengan target 700 Unit terealisasi 3853 unit dan capaiannya adalah 128,43%.

Sedangkan evaluasi untuk tahun 2021, pembahasan target dan capaian ini kami menyajikan indicator program dan kegiatan pada tahun 2021 yang telah yang telah disesuaikan dengan revisi Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017-2022. Tahun 2020 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana mendapat total anggaran sebesar Rp.13.688.836.800,- yang terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.332.831.000,- Dan Belanja Langsung sebesar Rp.12.356.005.800,-. Alokasi anggaran Belanja Langsung itu, untuk melaksanakan 9 program dan 38 Kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.621.458.077,- (99,51%).

Berikut ini kami sampaikan hasil pelaksanaan dan capaian dari rencana kerja tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yakni



Program :

- Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Indikator program ini adalah Persentase luas lahan bersertifikat dengan target 20,14488% terealisasi 20,14408% dan realisasi keuangan 86,20%, dan tingkat capaian terhadap Renstra yakni 4,40%. Hal ini diakibatkan anggaran yang tersedia hanya bisa melayani 22 KK, sehingga berimplikasi terhadap lambatnya pencapaian target bidang tanah kk miskin yang tersertifikasi. Oleh karena itu maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan akan mengusahakan untuk menambahkan anggaran untuk program ini.

Kegiatan :

- Kegiatan Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Indikator kegiatan ini yaitu jumlah bidang tanah kk miskin yang terfasilitasi dengan target 100 Bidang tanah terelasisasi 22 bidang tanah, dan realisasi keuangannya 100%.
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
 - Verifikasi lapangan usulan penerima bantuan sertifikat tanah.
2. Program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil dan keluaran yang direncanakan, yakni :

Kegiatan :

- Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan. Indikator kegiatan ini yaitu jumlah penyelenggaraan kegiatan pengembangan perumahan yang terkoordinir dengan target 5 kegiatan terealisasi 5 kegiatan, persentase capaian 100%, realisasi keuangannya 100,00%. Hal ini disebabkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana pro aktif terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat.
- Pembangunan Rumah Swadaya, indicator kinerjanya unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya dengan target 145 Unit dan terealisasi 145 unit dan realisasi keuangannya 100,00%.
- Verifikasi lapangan rencana pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu. Indikatornya jumlah usulan yang diverifikasi dengan target





120 usulan dan terealisasi 120 usulan, dan realisasi keuangannya 100,00%.

- Pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan indicator jumlah unit rumah yang terbangun dengan target 120 unit dan terealisasi 120 unit dan realisasi keuangannya sebesar 99,61%.
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan program lingkungan sehat perumahan dengan indicator kegiatan yaitu jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang terpantau dengan target 6 laporan dan terealisasi sebesar 100,00%.

3. Program / kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil dan keluaran yang direncanakan, yakni :

Program :

- Program pengembangan perumahan. Indikator program ini adalah Persentase rumah layak huni dengan target peningkatan sebesar 78,31% terealisasi 78,83%, realisasi keuangannya hanya 100,00% dan tingkat capaian target program terhadap RENSTRA yakni sebesar 42,71%.

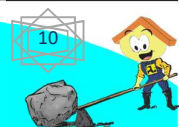
Penyebab capaian target melebihi target yang telah ditetapkan karena pada tahun 2019 ini Dinas Perumahan mendapatkan bantuan peningkatan kualitas rumah dari Kementerian PU dan PR melalui kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebesar 410 unit, dan bantuan bedah rumah dari APBD Provinsi sebesar 45 Unit.

Indikator Program ini berimplikasi langsung terhadap capaian Indikator Sasaran OPD yaitu Persentase KK miskin yang memiliki rumah layak huni dan peningkatan jumlah rumah layak huni di Kabupaten Bombana.

Oleh karena itu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni.

- Program Lingkungan sehat perumahan. Indikator program ini adalah Persentase penurunan baklog perumahan dengan target penurunan sebesar 60,00% terealisasi 57,62%, realisasi keuangannya 99,61% sedangkan tingkat capaian indicator program terhadap RENSTRA yakni sebesar 42,38%.

Penyebabnya adalah akumulasi realisasi capaian dari tahun sebelumnya.





Hal ini berimplikasi terhadap penurunan jumlah kk miskin yang tidak memiliki rumah di Kabupaten Bombana.

Sedangkan kebijakan yang dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana untuk menurunkan jumlah kk miskin yang tidak memiliki rumah adalah tidak hanya mengandalkan dan APBD saja melainkan aktif melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait permasalahan backlog perumahan, salah satu aksi nyatanya adalah dengan terus menyampaikan proposal ke Kementerian PU dan PR terkait bantuan Rumah khusus maupun rumah susun sewa (rusunawa).

- Program Pemberdayaan Komunitas perumahan. Indikator kinerja program ini adalah Persentase Rumah tangga pengguna listrik dengan target 52,21% terealisasi sebesar 52,67%, realisasi keuangannya 99,72% dan tingkat capaian indicator program terhadap capaian RESNTRA yakni sebesar 41,10%

Hal ini disebabkan adanya anggaran cukup besar yang tersedia untuk kegiatan utama program ini, dan disebabkan juga oleh adanya penerima yang menerima potongan harga biaya penyambungan karena penerima bantuan berada di daerah 3 T (terpencil, terluar, dan tertinggal).

Indikator program ini berkontribusi terhadap indicator sasaran OPD Persentase KK miskin yang memiliki akses terhadap energi listrik dan juga berdampak langsung terhadap pengurangan jumlah kk miskin yang tidak memiliki akses terhadap listrik. Dengan capaian yang melebihi dari target yang telah ditetapkan ini maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terus melakukan evaluasi pelaksanaan tahun ini guna perbaikan pelaksanaan di tahun mendatang.

Kegiatan :

- Verifikasi lapangan rencana pembangunan sarana dan prasarana dasar perumahan dengan indicator jumlah usulan yang diverifikasi dengan target 550 Usulan terealisasi 720 usulan dan realisasi keuangannya sebesar 100,00%.





- Pembangunan sarana dan prasana dasar perumahan dengan indicator kegiatan jumlah kk miskin yang disambungkan listrik dengan target 550 SR dan terealisasi sebesar 720 SR dan realisasi keuangannya sebesar 100,00%.
- Monitoring, evalausi, dan pelaporan program pemberdayaan komunitas perumahan, dengan indicator kegiatan yaitu laporan pelaksanaan kegiatan yang terpantau dengan target 1 laporan dan terealisasi 1 laporan dan realisasi keuangannya sebesar 100,00%.

Selain program dan kegiatan tersebut diatas, pelaksanaan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan didukung pula oleh program pendukung kesekretariatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, indicator kinerja persentase cakupan keterpenuhan pelayanan administrasi perkantoran dengan target 100% dan terealisasi 100%, realiasi keuangan sebesar 98,23% dan tingkat capaian indicator program terhadap RESNTRA yakni sebesar 40%, dengan 13 (tiga belas) kegiatannya :
 - 1.1. Penyediaan Jasa surat menyurat.
 - 1.2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air/listrik.
 - 1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/operasional.
 - 1.4. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
 - 1.5. Penyediaan jasa kebersihan kantor, peralatan kebersihan dan bahan pembersih
 - 1.6. Penyediaan alat tulis kantor
 - 1.7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 1.8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - 1.9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 1.10. Penyediaan makanan dan minuman
 - 1.11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
 - 1.12. Penyediaan jasa publikasi
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, indicator kinerjanya cakupan keterpenuhan sarana dan prasarana perkantoran dengan target





100% dan terealisasi 100%, realisasi keuangan sebesar 99,49% dan tingkat capaian indicator program terhadap RENSTRA yaitu sebesar 40%, dengan 9 (Sembilan) kegiatannya yaitu :

- 2.1. Pembangunan gedung kantor
 - 2.2. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - 2.3. Pengadaan Meubeleur
 - 2.4. Pengadaan komputer
 - 2.5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - 2.6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - 2.7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - 2.8. Pemeliharaan rutin/berkala computer
 - 2.9. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Peningkatan disiplin aparatur, indicator kinerjanya cakupan keterpenuhan SDM aparatur yang memenuhi standar disiplin aparatur dengan target 100%, terealisasi sebesar 100%, realisasi keuangan 100% dan tingkat capaian indicator program terhadap RENSTRA yaitu 25,00%, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
- 3.1. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, indicator kinerjanya cakupan keterpenuhan pengembangan system pelaporan dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100%, realisasi keuangan 100,00% dan tingkat capaian indicator program terhadap RESNTRA yakni 40%, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
- 4.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Program perencanaan pembangunan daerah, indicator kinerjanya cakupan keterpenuhan system perencanaan SKPD yang efektif dengan target 100,00% dan terealisasi 100,00%, realisasi keuangan sebesar 100,00% dan tingkat capaian indicator program terhadap RENSTRA yakni 25,00%, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
- 5.1. Penyusunan Renstra OPD

Untuk lebih detainya evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 dan capaian rencana strategis dapat dilihat pada table 2.1 berikut :







Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Su bkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2022	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6x100%)	9	10 (5+7+9)	11(10/4x100%)
	1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penurunan Backlog	0,00%	54,87%	20,00%	52,33%	59,58%	0,00%	49,89%	50,11%
	<i>Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Unit Rumah yang dibangun	600 KK	375 KK	120 KK	111 KK	92,50%	120 KK	593 KK	98,83%
	- Pembangunan Rumah Khusus Beserta Psu Bagi Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Rumah yang dibangun	600 Unit	375 Unit	120 Unit	111 Unit	92,50%	120 Unit	593 Unit	98,83%
		Jumlah usulan yang diverifikasi	600 Usulan	375 Usulan	120 Usulan	120 Usulan	100%	120 Usulan	600 Usulan	100,00%
		Jumlah Laporan pelaksanaan	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	100,00%





	2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase KK dikawasan kumuh yang ditangani rumahnya	17,98%	-	-	0,00%	0%	17,98%	17,98%	100,00%
	<i>Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh)</i>	Terlaksananya penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan	Ada					Ada	Ada	100,00%
	Penyusunan / Review / Legalisasi Kebijakan Bidang Pkp	Terlaksananya penyusunan rencana pembangunan dan	Ada	-				Ada	Ada	100,00%
	3 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Peningkatan Rumah layak huni	90,73%	83,32%	86,51%	89,72%	103,71%	90,73%	92,18%	101,60%
	<i>Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh</i>	Jumlah unit rumah yang direhabilitasi	3000 Unit	1763 Unit	650 Unit	1270 Unit	195,38%	700 Unit	3853 Unit	128,43%
	- Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta Psu Diluar Kawasan	Jumlah Kerjasama	2 Kerjasama	-	1 Kerjasama	1 Kerjasama	100%	1 Kerjasama	2 Kerjasama	100,00%





	4 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat	20,14624%	20,14453%	20,14579%	20,14498%	99,9960%	20,14624%	20,14544%	99,9960%
	<i>Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah KK Miskin yang terfasilitasi	500 KK	122 KK	300 KK	222 KK	74,00%	100 KK	322 KK	64,40%
	- Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	Jumlah kerjasama fasilitasi sertifikat	5 Kerjasama	3 Kerjasama	1 Kerjasama	1 Kerjasama	100%	1 Kerjasama	5 Kerjasama	100,00%
	5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	Persentase Peningkatan Rumah tangga pengguna	57,12%	54,53%	55,36%	56,72%	102,46%	57,12%	58,41%	102,26%
	<i>Urusan Penyelenggaraan Psu Perumahan</i>	Jenis PSU Perumahan yang disediakan	5 Jenis	3 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	5 Jenis	5 Jenis	100,00%
	- Perencanaan Penyediaan Psu Perumahan	Jumlah Usulan Penyediaan PSU	3000 Usulan	1971 Usulan	650 Usulan	867 Usulan	133%	3000 Usulan	3512 Usulan	117,07%
	- Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Perumahan	Jumlah sambungan rumah listrik bagi kk	3000 SR	1971 SR	650 SR	867 SR	133%	3000 SR	3512 SR	117,07%
		Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan yang	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	100%





	6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kabupaten	200%		100%	100,00%	100,00%	100%	200%	100,00%
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran	24 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	24 Dokumen	100,00%
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang ditetapkan	4 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka - Skpd	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang ditetapkan	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka - Skpd	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang ditetapkan	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
	Koordinasi Dan Penyusunan Dpa - Skpd	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang ditetapkan	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa - Skpd	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang ditetapkan	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisari Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	100,00%





	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan pemenuhan administrasi keuangan</i>	200%		100%	100%	100%		200%	100,00%
	- Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Persentase ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan sesuai	200%		100%	100%	100%	100%	200%	100,00%
	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi	24 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	100,00%
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	100,00%
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Skpd	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran/semesta SKPD	24 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	100,00%
	<i>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i>	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat</i>	200%				100%		200%	100,00%
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil penatausahaan BMD pada SKPD	24 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	100,00%
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian</i>	200%				100%		200%	100,00%
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	80 Stel		40 Stel	40 Stel	100%	40 Stel	80 Stel	100,00%





	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	4 Orang		2 Orang	2 Orang	100%	2 Orang	4 Orang	100,00%
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan pemenuhan administrasi umum</i>	200%		100%	100%	100%		200%	100,00%
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	62 Buah		31 Buah	31 Buah	100%	31 Buah	62 Buah	100,00%
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis dan jumlah logistik kantor yang dibeli	6 Jenis		3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	6 Jenis	100,00%
	- Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	4 Jenis		2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	4 Jenis	100,00%
	- Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	120 Exempler		60 Exempler	60 Exempler	100%	60 Exempler	120 Exempler	100,00%
	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	24 Kunjungan		12 Kunjungan	12 Kunjungan	100%	12 Kunjungan	24 Kunjungan	100,00%
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	120 Kali		60 Kali	60 Kali	100%	60 Kali	120 Kali	100,00%
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100,00%





	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda</i>	<i>Jenis dan jumlah BMD penunjang urusan</i>	8 Unit		4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	8 Unit	100,00%
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Dan Lapangan	Jenis dan jumlah kendaraan dinas operasional	2 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	100,00%
	- Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jenis dan jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	6 Unit		3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	6 Unit	100,00%
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Cakupan pemenuhan jasa penunjang</i>	200%				100%		200%	100,00%
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pemenuhan biaya/jasa pengiriman surat	200%		100%	100%	100%	100%	200%	100,00%
	- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Dayar Air Dan Listrik	Cakupan pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya listrik, dan air	200%		100%	100%	100%	100%	200%	100,00%
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis dan jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	6 Jenis		3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	6 Jenis	100,00%
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemda</i>	<i>Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan</i>	20 Jenis		10 Jenis	10 Jenis	100%	10 Jenis	20 Jenis	100,00%
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Dan Lapangan	Jenis dan jumlah kendaraan dinas operasional	14 Unit		7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	14 Unit	100,00%





	- Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jenis dan jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Jenis		2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	4 Jenis	100,00%
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	JuLuas gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/	256 M		128 M	128 M	100%	128 M	256 M	100,00%
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Jenis dan jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan	22 Unit		11 Unit	11 Unit	100%	11 Unit	22 Unit	100,00%





2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana tahun 2022 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017-2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

1. Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indicator Persentase KK miskin yang memiliki rumah layak huni.
Capaian kerjanya melampaui target yang telah ditentukan yakni 74,22% dari target 73,15%.
2. Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indicator Persentase KK miskin yang memiliki akses terhadap energi listrik.
Capaian kerjanya melampaui target yang telah ditentukan yakni 81,91% dari target 80,03%.
3. Capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sesuai Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan adalah :
 - Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab/kota
Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan tahun 2020 secara umum tidak mencapai target yang telah ditetapkan ,dengan pencapaian 867 Unit dari target 874 Unit.
4. Capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK).
 - Rasio rumah layak huni, Capaian kinerja ini melebihi target yang telah ditetapkan yakni 0,150 dari target 0,149.
 - Cakupan ketersediaan rumah layak huni, capaian kinerja ini lebih target yang telah ditetapkan yakni 78,83% dari target 78,31%.





Untuk lebih detailnya tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan standar pelayanan Minimal periode sebelumnya disajikan dalam Tabel 2.2.







**ANALISIS KINERJA PELAYANAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase KK miskin yang memiliki rumah layak huni			82,10%	91,05%	100,00%	71,48%	75,45%	98,46%	100,00%	71,48%	Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mengurangi jumlah KK miskin
2	Persentase KK miskin yang memiliki akses terhadap energi listrik			86,18%	92,83%	100,00%	83,46%	89,46%	98,34%	100,00%	83,46%	Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mengurangi jumlah KK miskin
3		Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		1 Unit	1 Unit	0 Unit		1 Unit	1 Unit	0 Unit		Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menambah jumlah rumah layak huni





4.		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab/kota		1.833 Unit	35 Unit	20 Unit	0	1.277 Unit	35 Unit	20 Unit	0	
5			Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	82,37%	86,51%	90,73%	0,00%	83,32%	89,72%	90,73%	0,00%	Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni





2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Penjabaran arah perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bersifat saling terkait atau saling mempengaruhi dengan perkembangan kondisi factor eksternal organisasi berupa perkembangan pembangunan wilayah, Visi dan Misi Kepala Daerah, program – program nasional dan lain-lain. Untuk maksud tersebut, berikut beberapa isu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mencakup hal-hal berikut :

1. Kinerja pelayanan dan hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan antara lain :
 - 1.1. Pelayanan penyediaan perumahan dalam rangka penurunan backlog perumahan
 - a) Fasilitasi pembangunan Rumah khusus nelayan
Fasilitasi pembangunan rumah khusus nelayan berkontribusi terhadap penurunan backlog perumahan
 - 1.2. Pelayanan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH)
 - a) Fasilitasi dan konsultasi mengenai perumahan (peningkatan kualitas rumah tidak layak huni)
Konsultasi perumahan berupa konsultasi mengenai mekanisme konstruksi perumahan, biaya-biaya yang harus dikeluarkan dengan mengacu pada standar-standar harga yang ada sesuai dengan konstruksi rumah yang diinginkan dan konsultasi mengenai rumah sehat. Fasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berupa program perbaikan rumah menjadi rumah layak huni;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ;
Permasalahan :
 - 2.1. Kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog)
 - 2.2. Keterbatasan pengembang yang membangun rumah sejatera tapak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
 - 2.3. Rendahnya keterjangkauan MBR (affordability) untuk membangun dana atau memperbaiki rumah layak yang layak;
 - 2.4. Pembangunan rumah MBR terkendala harga lahan yang tinggi;





- 2.5. Tidak adanya akses perbankan untuk masyarakat berpenghasilan rendah terutama berpenghasilan tidak tetap terhadap perumahan;
 - 2.6. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
 - 2.7. Keterbatasan lokasi atau lahan untuk pengembangan perumahan baru;
 - 2.8. Belum adanya serah terima asset oleh pelaku pembangunan
 - 2.9. Keterbatasan penyediaan rumah;
 - 2.10. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai;
 - 2.11. Permukiman kumuh yang makin meluas;
3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, program nasional dan internasional (missal Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Millenium Development Goals (MDG's))

1. Visi dan Misi Bupati Bombana Tahun 2017-2022

Dalam Perda Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 disampaikan Visi Bupati Bombana adalah **“Mewujudkan Bombana Sejahtera”** . Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang perlu menjadi perhatian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdapat pada Misi Ke-4 (Empat) Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Misi Ke-2 (Kedua) Melanjutkan Reformasi Birokrasi;

2. MDG's (Milenium Development Goals)

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana terhadap komitmen dunia untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan, maka ditetapkan *Goal*/(tujuan) untuk pengembangan prasarana dan sarana lingkungan permukiman pada tahun 2018 guna memenuhi beberapa kebutuhan hidup dasar masyarakat.



3. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab 2.2. diatas pelaksanaan SPM bidang Perumahan tahun 2018 terintegrasi dalam 1(satu) program yaitu Program Lingkungan sehat perumahan.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

A. Tantangan

1. Kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog)
2. Keterbatasan pengembang yang membangun rumah sejahtera tapak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
3. Rendahnya keterjangkauan MBR (affordability) untuk membangun dana tau memperbaiki rumah layak;
4. Pembangunan rumah MBR terkendala harga lahan yang tinggi
5. Tidak adanya akses perbankan untuk masyarakat berpenghasilan rendah terutama berpenghasilan tidak tetap terhadap perumahan;
6. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya rumah dan lingkungan sehat;
7. Kurang optimalnya penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
8. Keterbatasan lokasi atau lahan untuk pengembangan perumahan baru;
9. Belum adanya serah terima asset oleh pelaku pembangunan di Bidang perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Bombana;
10. Menyediakan sarana prasarana permukiman untuk penduduk yang dikarenakan oleh pertumbuhan penduduk serta urbanisasi;
11. Faktor kemiskinan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat terhadap perumahan. Akibatnya masyarakat berpenghasilan rendah tinggal di kawasan permukiman kumuh yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dan ekseibilitas infrastruktur permukiman yang tidak memadai;
12. Sustainable Development Goals (SDGs). Terdapat Global Goals yang berkaitan langsung dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yaitu SDGs Goals 11 Mewujudkan



perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan;

13. Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah (PD) dan instansi terkait.

B. Peluang

1. Amanat Undang-Undang Dasar 1945, bahwa rumah adalah hak dasar rakyat;
2. Perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah;
4. Upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
5. Komitmen dan kemauan politik Pemerintah Kabupaten Bombana dalam pengentasan kemiskinan;

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023

Berdasarkan review Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan hasil sebagai berikut :

1. Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan kegiatan generic yang berkaitan dengan operasional kantor, program bidang perumahan, bidang permukiman, dan program bidang pertanahan.

Uraian hasil review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada table 2.3 berikut ini :



Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOMBANA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.	Program Pengembangan Perumahan	Kab. Bombana	Persentase Penurunan Backlog	10,48%	20.000.000	1. Program Pengembangan Perumahan	Kab. Bombana	Persentase Penurunan Backlog	10,48%	20.000.000	
	- Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bombana	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	1 Laporan	20.000.000	- Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bombana	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	1 Laporan	20.000.000	
	- Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Kab. Bombana	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	6 Orang	20.000.000	- Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Kab. Bombana	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	6 Orang	20.000.000	





2.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Bombana	Persentase Penurunan luas kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten	95,05%	3.600.000.000	2.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Bombana	Persentase Penurunan luas kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten	95,05%	3.600.000.000
	- Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Bombana	Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	2,38 Ha	600.000.000		- Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Bombana	Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	2,38 Ha	600.000.000
	<i>Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP</i>	<i>Kab. Bombana</i>	<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>600.000.000</i>		<i>Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP</i>	<i>Kab. Bombana</i>	<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>600.000.000</i>
	- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Bombana	Jumlah Kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	2 Kawasan	3.000.000.000		- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Bombana	Jumlah Kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	2 Kawasan	3.000.000.000
	- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Bombana	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	50 Unit	1.000.000.000		- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Bombana	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	50 Unit	1.000.000.000
	- Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Kab. Bombana	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	50 Unit	2.000.000.000		- Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Kab. Bombana	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	50 Unit	2.000.000.000





3.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kab. Bombana	Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	28,67%	5.050.000.000	3.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kab. Bombana	Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	28,67%	5.050.000.000	
	- Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bombana	Jumlah lokasi yang ditangani tumbuh dan berkembangnya	5 Lokasi	5.050.000.000		- Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bombana	Jumlah lokasi yang ditangani tumbuh dan berkembangnya	5 Lokasi	5.050.000.000	
	- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Bombana	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	250 Unit	5.000.000.000		- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Bombana	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	250 Unit	5.000.000.000	
	- Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Bombana	Jumlah Kerjasama Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Kerjasama	50.000.000		- Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Bombana	Jumlah Kerjasama Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Kerjasama	50.000.000	





4.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH	Kab. Bombana	Jumlah Bidang Tanah Masyarakat yg terfasilitasi	50 Bidang Tanah	50.000.000	4.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH	Kab. Bombana	Jumlah Bidang Tanah Masyarakat yg terfasilitasi	50 Bidang Tanah	50.000.000	
	- Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan	Kab. Bombana	Jumlah KK yang terfasilitasi	50 KK	50.000.000		- Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan	Kab. Bombana	Jumlah KK yang terfasilitasi	50 KK	50.000.000	
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Bombana	Terinventarisasi ya Tanah-Tanah Milik Masyarakat Miskin	1 Laporan	50.000.000		- Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Bombana	Terinventarisasi ya Tanah-Tanah Milik Masyarakat Miskin	1 Laporan	50.000.000	
5.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Bombana	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0,14660%	780.000.000	5.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Bombana	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0,14660%	780.000.000	
	- Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Bombana	Jenis PSU yang disediakan	1 Jenis	780.000.000		- Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Bombana	Jenis PSU yang disediakan	1 Jenis	780.000.000	





	- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Bombana	Jumlah Rumah Penerima manfaat dari Penyediaan Jaringan Tenaga Listrik	300 Unit	780.000.000		- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Bombana	Jumlah Rumah Penerima manfaat dari Penyediaan Jaringan Tenaga Listrik	300 Unit	780.000.000	
			Jumlah Usulan Penerima yang diverifikasi	300 Usulan					Jumlah Usulan Penerima yang diverifikasi	300 Usulan		
			Jumlah Laporan Monitoring	1 Laporan					Jumlah Laporan Monitoring	1 Laporan		
6.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	DPKPP	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	100%	2.741.000.000	6.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	DPKPP	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	100%	2.741.000.000	
	- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	7 Dokumen	50.000.000		- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	7 Dokumen	50.000.000	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang	2 Dokumen	30.000.000		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang	2 Dokumen	30.000.000	
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang ditetapkan	1 Dokumen	4.000.000		- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang ditetapkan	1 Dokumen	4.000.000	





	- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang ditetapkan	1 Dokumen	4.000.000		- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang ditetapkan	1 Dokumen	4.000.000	
	- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang ditetapkan	1 Dokumen	4.000.000		- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang ditetapkan	1 Dokumen	4.000.000	
	- Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang ditetapkan	1 Dokumen	4.000.000		- Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang ditetapkan	1 Dokumen	4.000.000	
	- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Dokumen	4.000.000		- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Dokumen	4.000.000	
	- Administrasi keuangan perangkat daerah	Dalam daerah	Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	1.863.000.000		- Administrasi keuangan perangkat daerah	Dalam daerah	Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	1.863.000.000	
	- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Dalam daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1.700.000.000		- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Dalam daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1.700.000.000	
	- Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Dalam daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	12 Dokumen	130.000.000		- Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Dalam daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	12 Dokumen	130.000.000	





	- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dalam daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	1 Laporan	3.000.000		- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dalam daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	1 Laporan	3.000.000	
	- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Dalam daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	30.000.000		- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Dalam daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	30.000.000	
	- Administrasi barang milik daerah	Dalam daerah	Cakupan pemenuhan administrasi BMD	100%	15.000.000		- Administrasi barang milik daerah	Dalam daerah	Cakupan pemenuhan administrasi BMD	100%	15.000.000	
	- Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Dalam daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	12 Laporan	15.000.000		- Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Dalam daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	12 Laporan	15.000.000	
	- Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dalam daerah	Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian	100%	34.000.000		- Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dalam daerah	Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian	100%	34.000.000	
	- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pakaian dinas beserta Atribut kelengkapannya	40 Paket	14.000.000		- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pakaian dinas beserta Atribut kelengkapannya	40 Paket	14.000.000	
	- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Luar Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	2 Orang	20.000.000		- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Luar Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	2 Orang	20.000.000	



Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023



	- Administrasi umum perangkat daerah	Dalam daerah	Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	427.000.000		- Administrasi umum perangkat daerah	Dalam daerah	Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	427.000.000	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dalam daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	1 Paket	2.000.000		- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dalam daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	1 Paket	2.000.000	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dalam daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	4 Unit	10.000.000		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dalam daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	4 Unit	10.000.000	
	- Penyediaan bahan logistic kantor	Dalam daerah	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Jenis	16.000.000		- Penyediaan bahan logistic kantor	Dalam daerah	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Jenis	16.000.000	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dalam daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.000.000		- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dalam daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.000.000	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dalam daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	12.000.000		- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dalam daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	12.000.000	
	- Fasilitasi kunjungan tamu	Dalam daerah	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Kunjungan	12.000.000		- Fasilitasi kunjungan tamu	Dalam daerah	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Kunjungan	12.000.000	
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Kali	350.000.000		- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Kali	350.000.000	



Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023



	- Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dalam daerah	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan	100%	18.000.000		- Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dalam daerah	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan	100%	18.000.000	
	- Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jenis dan jumlah BMD penunjang urusan pemerintah	15 Unit	85.000.000		- Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jenis dan jumlah BMD penunjang urusan pemerintah	15 Unit	85.000.000	
	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	1 Unit	25.000.000		- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	1 Unit	25.000.000	
	Pengadaan Mebel	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	30.000.000		Pengadaan Mebel	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	30.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	10.000.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	10.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	10.000.000		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	10.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	10.000.000		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	10.000.000	
	- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Dalam daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	146.500.000		- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Dalam daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	146.500.000	
	- Penyediaan jasa surat menyurat	Dalam daerah	Cakupan pemenuhan	100%	1.500.000		- Penyediaan jasa surat menyurat	Dalam daerah	Cakupan pemenuhan	100%	1.500.000	
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dalam daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa	3 Jenis	100.000.000		- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dalam daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa	3 Jenis	100.000.000	



Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023



	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Dalam daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Jenis	45.000.000		- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Dalam daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Jenis	45.000.000	
	- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Dalam daerah	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi	40 Unit	120.500.000		- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Dalam daerah	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi	40 Unit	120.500.000	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Dalam daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	7 Unit	65.000.000		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Dalam daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	7 Unit	65.000.000	
	- Pemeliharaan Mebel	Dalam daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	15.000.000		- Pemeliharaan Mebel	Dalam daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	15.000.000	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dalam daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	10.000.000		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dalam daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	10.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dalam daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	15.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dalam daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	15.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dalam daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	10.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dalam daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	10.000.000	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dalam daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	5.500.000		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dalam daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	5.500.000	





Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023					
KABUPATEN BOMBANA					
No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kab. Bombana	Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni		
1.1	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota		Jumlah lokasi yang ditangani tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh		
	<i>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	<i>Boepinang Barat</i>	<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki</i>	<i>30 Unit</i>	<i>Pokir DPRD (ASKHAR, ST)</i>





BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKPD Tahun 2023: “*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*”, pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

Secara rinci 10 (sepuluh) fokus pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Industri pengolahan Non Migas 5,8-6,5%
 - b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97-17,99%
 - c. Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp 352,5 T
2. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Jumlah Wisatawan Mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan
 - b. Peringkat *Travel and Tourism Competitiveness Index* 36-39





3. Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Skor Pola Pangan Harapan 92,8
 - b. Nilai Tukar Petani 102-104
 - c. Nilai Tukar Nelayan 102-105
 - d. Ketersediaan Beras 44 juta ton
 - e. Ketersediaan Protein Hewani 2,7 juta ton
 - f. Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian Rp. 54,3 juta/org/thn
4. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Wirausaha 3%
 - b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%
 - c. UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9%
5. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit.
 - b. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi
 - c. Panjang Jalan Tol Baru: 400 km
 - d. Penambahan Debit Air Baku 5 m³/s
 - e. Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR
 - f. Pembangunan Akses Sanitasi Aman (sistem terpusat dan system setempat) 2.000.000 SR
 - g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha
 - h. Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh
6. Fokus transformasi digital dilakukan untuk Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Masyarakat pengguna internet 79,20%
 - b. Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 42,85%
 - c. 72.500 SDM talenta digital
 - d. 12,4 juta *local champion* literasi digital
 - e. 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi





- f. 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber
7. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Penurunan Emisi GRK Nasional terhadap *Baseline* 26,87%
 - b. Penurunan Intensitas Emisi GRK Nasional terhadap *Baseline* 21,54%
 - c. Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%
 - d. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW
8. Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan sosial, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Tingkat Kemiskinan 8,5-9%
 - b. Penduduk yang tercapuk dalam Program Jaminan Sosial 87%
 - c. Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial 60%
 - d. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah 110.7 Juta Penduduk
9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55%
 - b. Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6%
 - c. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%
 - d. 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)
 - e. 900 Paten Domestik
10. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%
 - b. Insidensi TB 231/100.000 Penduduk
 - c. Persalinan di fasilitas kesehatan 91%
 - d. Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%
 - e. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%



- f. RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80%
- g. Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% & RS 90%
- h. Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab

Prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 agar diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:





- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
 - b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
 - c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
 - d. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
 - e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan; dan



g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan

Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a. Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c. Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:





- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
 - c. Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b. Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
 - c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata Kelola keamanan siber;
 - d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
 - e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan nasional tahun 2022 maka ditetapkan target pembangunan nasional tahun 2022, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %
3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %





1.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tujuan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengacu pernyataan visi dan misi Bupati, maka Tujuan spesifik pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana yang ingin dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 2017 – 2022 adalah terjadinya efektifitas pelaksanaan kegiatan, tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk Tahun 2022 yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan : (a) arah kebijakan keuangan daerah, (b) strategi pembangunan daerah. (c) kebijakan umum. (d) program perangkat daerah (PD) dan lintas Perangkat Daerah, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Sasaran Rencana Kinerja Perangkat Daerah

Dengan tujuan spesifik pembangunan tersebut diatas, maka sasaran umum yang menjadi target atau hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana dalam kurun waktu 2023-2026 adalah sebagai berikut : (PerMenPAN Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah) :

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni
 - Persentase peningkatan rumah layak huni
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap energi listrik
 - persentase peningkatan rumah tangga pengguna listrik
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana
 - Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspectorat

1.3. Program dan Kegiatan

Dengan mencermati hasil review terhadap rancangan rencana kerja dan perkembangan capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana sampai tahun 2023 yang didasari atas Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan





Kabupaten Bombana 2023-2026 serta hasil kajian atas rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 51 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD) Kabupaten Bombana Tahun 2023, maka rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
 - b. Administrasi keuangan perangkat daerah
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
 - c. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
 - Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
 - d. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Bimbingan teknis implemementasi peraturan perundang-undangan
 - e. Administrasi umum perangkat daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan logistic kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Fasilitasi kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD



- Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
 - f. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - g. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - h. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
 - Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya
2. Program pengembangan perumahan
- a. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota
 - Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota
3. Program Kawasan permukiman
- a. Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha
 - Penyusunan /review /legalisasi kebijakan bidang PKP
 - b. Peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha
 - Perbaikan rumah tidak layak huni
4. Program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh
- a. Pencegahan perumahan dan Kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupten/kota



- Kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU diluar Kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha
- 5. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)
 - a. Urusan penyelenggaraan PSU Perumahan
 - Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian
 - Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan
 - 6. Program penatagunaan tanah
 - a. Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota
 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah

Memperhatikan uraian-uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2023 direncanakan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak **6 program kerja, 14 kegiatan dan 43 subkegiatan** dengan rencana total anggaran sebesar Rp. 12.241.000.000,- .

Lebih lanjut tentang penjabaran rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.1.berikut dibawah :

Tabel T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
	1. Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penurunan Backlog	Kab. Bombana	10,48%	20.000.000	APBD		10,35%	20.000.000
	- Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi dan persiapan	Kab. Bombana	1 Laporan	20.000.000	APBD		1 Laporan	20.000.000
	- Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Kab. Bombana	6 Orang	20.000.000	APBD		6 Orang	20.000.000

	2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penurunan luas kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten	Kab. Bombana	95,05%	3.600.000.000	APBD		81,96%	3.000.000.000
	- Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Kab. Bombana	2,38 Ha	600.000.000	APBD			-
	<i>Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP</i>	<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi</i>	<i>Kab. Bombana</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>600.000.000</i>	<i>APBD</i>			
	- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Kab. Bombana	2 Kawasan	3.000.000.000	APBD		2 Kawasan	3.000.000.000
	- Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kab. Bombana	50 Unit	1.000.000.000	APBD		50 Unit	1.000.000.000
	- Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	Kab. Bombana	50 Unit	2.000.000.000	APBD		50 Unit	2.000.000.000



3.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Bombana	28,67%	5.050.000.000	APBD		27,79%	5.000.000.000
	- Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang ditangani tumbuh dan berkembangnya	Kab. Bombana	5 Lokasi	5.050.000.000	APBD		140 Unit	5.000.000.000
	- Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kab. Bombana	250 Unit	5.000.000.000	APBD		250 Unit	5.000.000.000





		- Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kerjasama Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Bombana	1 Kerjasama	50.000.000	APBD		1 Kerjasama	50.000.000
	4.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN	Jumlah Bidang Tanah Masyarakat yg terfasilitasi	Kab. Bombana	50 Bidang Tanah	50.000.000	APBD		50 Bidang Tanah	50.000.000
		- Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan	Jumlah KK yang terfasilitasi	Kab. Bombana	50 KK	50.000.000	APBD		50 KK	50.000.000
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terinventarisasi ya Tanah-Tanah Milik Masyarakat Miskin	Kab. Bombana	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	50.000.000



	5. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Kab. Bombana	0,14660%	780.000.000	APBD		0,14639%	780.000.000
	- Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jenis PSU yang disediakan	Kab. Bombana	1 Jenis	780.000.000	APBD		1 Jenis	780.000.000
	- <i>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</i>	<i>Jumlah Rumah Penerima manfaat dari Penyediaan Jaringan Tenaga Listrik</i>	<i>Kab. Bombana</i>	<i>300 Unit</i>	<i>780.000.000</i>	<i>APBD</i>		<i>300 Unit</i>	<i>780.000.000</i>
		<i>Jumlah Usulan Penerima yang diverifikasi</i>		<i>300 Usulan</i>				<i>300 Usulan</i>	
		<i>Jumlah Laporan Monitoring</i>		<i>1 Laporan</i>				<i>1 Laporan</i>	
	6. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	DPKPP	100%	2.741.000.000	APBD		100%	2.716.000.000

	- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	Dalam dan Luar Daerah	7 Dokumen	50.000.000	APBD		7 Dokumen	50.000.000
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang	Dalam dan Luar Daerah	2 Dokumen	30.000.000	APBD		2 Dokumen	30.000.000
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang ditetapkan	Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	4.000.000	APBD		1 Dokumen	4.000.000
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang ditetapkan	Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	4.000.000	APBD		1 Dokumen	4.000.000
	- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang ditetapkan	Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	4.000.000	APBD		1 Dokumen	4.000.000
	- Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang ditetapkan	Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	4.000.000	APBD		1 Dokumen	4.000.000
	- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	4.000.000	APBD		1 Dokumen	4.000.000
	- Administrasi keuangan perangkat daerah	Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Dalam daerah	100%	1.863.000.000	APBD		100%	1.863.000.000



		- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dalam daerah	20 Orang/bulan	1.700.000.000	APBD		20 Orang/bulan	1.700.000.000
		- Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Dalam daerah	12 Dokumen	130.000.000	APBD		12 Dokumen	130.000.000
		- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	Dalam daerah	1 Laporan	3.000.000	APBD		1 Laporan	3.000.000
		- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dalam daerah	12 Laporan	30.000.000	APBD		12 Laporan	30.000.000
		- Administrasi barang milik daerah	Cakupan pemenuhan administrasi BMD	Dalam daerah	100%	15.000.000	APBD		100%	15.000.000
		- Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Dalam daerah	12 Laporan	15.000.000	APBD		12 Laporan	15.000.000



	- Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian	Dalam daerah	100%	34.000.000	APBD		100%	34.000.000
	- <i>Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya</i>	<i>Jumlah pakaian dinas beserta Atribut kelengkapannya</i>	<i>Dalam dan Luar Daerah</i>	<i>40 Paket</i>	<i>14.000.000</i>	<i>APBD</i>		<i>40 Paket</i>	<i>14.000.000</i>
	- <i>Bimbingan teknis impelementasi peraturan perundang-undangan</i>	<i>Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</i>	<i>Luar Daerah</i>	<i>2 Orang</i>	<i>20.000.000</i>	<i>APBD</i>		<i>2 Orang</i>	<i>20.000.000</i>
	- Administrasi umum perangkat daerah	Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Dalam daerah	100%	427.000.000	APBD		100%	427.000.000
	- <i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga</i>	<i>Dalam daerah</i>	<i>1 Paket</i>	<i>2.000.000</i>	<i>APBD</i>		<i>1 Paket</i>	<i>2.000.000</i>
	- <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang</i>	<i>Dalam daerah</i>	<i>4 Unit</i>	<i>10.000.000</i>	<i>APBD</i>		<i>4 Unit</i>	<i>10.000.000</i>
	- <i>Penyediaan bahan logistic kantor</i>	<i>Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	<i>Dalam daerah</i>	<i>3 Jenis</i>	<i>16.000.000</i>	<i>APBD</i>		<i>3 Jenis</i>	<i>16.000.000</i>



		- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dalam daerah	2 Paket	7.000.000	APBD		2 Paket	7.000.000
		- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dalam daerah	60	12.000.000	APBD		60	12.000.000
		- Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dalam daerah	12 Kunjungan	12.000.000	APBD		12 Kunjungan	12.000.000
		- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	60 Kali	350.000.000	APBD		60 Kali	350.000.000
		- Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan	Dalam daerah	100%	18.000.000	APBD		100%	18.000.000
		- Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis dan jumlah BMD penunjang urusan pemerintah	Dalam dan Luar Daerah	15 Unit	85.000.000	APBD		15 Unit	60.000.000
		- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	Dalam dan Luar Daerah	1 Unit	25.000.000	APBD			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dalam dan Luar Daerah	5 Unit	30.000.000	APBD		5 Unit	30.000.000



		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dalam dan Luar Daerah	3 Unit	10.000.000	APBD		3 Unit	10.000.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dalam dan Luar Daerah	3 Unit	10.000.000	APBD		3 Unit	10.000.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dalam dan Luar Daerah	3 Unit	10.000.000	APBD		3 Unit	10.000.000
		- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	Dalam daerah	100%	146.500.000	APBD		100%	146.500.000
		- Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan pemenuhan	Dalam daerah	100%	1.500.000	APBD		100%	1.500.000
		- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa	Dalam daerah	3 Jenis	100.000.000	APBD		3 Jenis	100.000.000
		- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dalam daerah	3 Jenis	45.000.000	APBD		3 Jenis	45.000.000



	- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi	Dalam daerah	40 Unit	120.500.000	APBD		40 Unit	120.500.000
	- <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau</i>	Dalam daerah	<i>7 Unit</i>	<i>65.000.000</i>	<i>APBD</i>		<i>7 Unit</i>	<i>65.000.000</i>
	- <i>Pemeliharaan Mebel</i>	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	Dalam daerah	<i>10 Unit</i>	<i>15.000.000</i>	<i>APBD</i>		<i>10 Unit</i>	<i>15.000.000</i>
	- <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Dalam daerah	<i>5 Unit</i>	<i>10.000.000</i>	<i>APBD</i>		<i>5 Unit</i>	<i>10.000.000</i>
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Dalam daerah	<i>2 Unit</i>	<i>15.000.000</i>	<i>APBD</i>		<i>2 Unit</i>	<i>15.000.000</i>
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Dalam daerah	<i>5 Unit</i>	<i>10.000.000</i>	<i>APBD</i>		<i>5 Unit</i>	<i>10.000.000</i>



		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dalam daerah	11 Unit	5.500.000	APBD		11 Unit	5.500.000
--	--	--	--	--------------	---------	-----------	------	--	---------	-----------





BAB IV PENUTUP

Memperhatikan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Guna mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 serta hasil penjarangan aspirasi masyarakat lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab); maka pada Tahun 2022, lewat Peraturan Bupati Bombana Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD) Kabupaten Bombana Tahun 2023, direncanakan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebanyak **6 program kerja, 14 kegiatan dan 43 subkegiatan** dengan rencana total anggaran sebesar **Rp. 12.241.000.000,00,-**.

Sehubungan dengan kesenjangan yang lebar antara rencana anggaran yang dialokasikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 dengan kebutuhan anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi khususnya dalam mensukseskan pencapaian Visi dan Misi Bupati Bombana, maka dapat disarankan untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menyusun ulang prioritas kegiatan berikut rincian sub-sub kegiatannya dengan tetap memperhatikan rencana tingkat keberhasilan capaian Indikator Kinerja yang diharapkan, baik Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Daerah maupun Indikator Kinerja Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.
2. Mengupayakan pemenuhan anggaran melalui berbagai sumber pendanaan lain yang memungkinkan, baik dari Pemerintah (Provinsi, Pusat/ Kementerian/ Lembaga Pemerintah lainnya) dan swasta maupun berbagai lembaga pendanaan/donor lainnya di dalam negeri maupun di luar negeri. Khususnya bagi program kerja dan kegiatan yang menjadi perhatian dunia, nasional maupun regional Provinsi.





3. Merencanakan pelaksanaan program kerja dan kegiatan melalui pendekatan/pemahaman yang layak jual dan ada keterkaitan dengan program-program nasional/regional Provinsi.
4. Melakukan inventarisasi /pendataan data dan informasi yang relevan dalam rangka menunjang kelayakan berbagai program kerja dan kegiatan yang direncanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana.

Demikian uraian Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2023 yang disusun sebagai bentuk tanggung jawab Instansi dalam upaya perwujudan keberhasilan Visi dan Misi dari Kepala Daerah Kabupaten Bombana.

KEPALA DINAS



Ir. RUSDIAMIN

NIP. 19651231 200502 1 026

